

PESANTREN-PESANTREN KITA

Oleh Nurcholish Madjid

Konon kabarnya ketika pada awal abad ini Pemerintah Negeri Belanda tidak mampu menahan arus gerakan perikemanusiaan dan perbaikan nasib atau *aufklarung* yang melanda Eropa Barat dan mempengaruhi antara lain anggota-anggota parlemen atau *volksraad* Belanda, sebuah kebijaksanaan baru lalu disusun dalam hubungannya dengan jajahannya di timur, yaitu Hindia Belanda. Kebijakan baru itu ialah yang kemudian terkenal dengan politik etis. Salah satu perwujudannya ialah didirikannya sekolah-sekolah untuk pribumi yang lebih bersifat umum atau massal daripada sebelumnya.

Sekalipun telah dinamakan “politik etis”, namun bau kolonialnya masih tetap terasa. Antara lain sistem penerimaan muridnya yang diskriminatif berdasarkan kriteria strata sosial. Dan lebih penting lagi ialah sifat dan tujuan pendidikan itu sendiri, yang untuk sebagian besar masih bersifat dukungan atau penunjangan kepada tujuan-tujuan kolonialis Belanda. Satu segi adalah apa yang sering dikemukakan oleh para ahli pendidikan kita bahwa tujuan dan sifat pendidikan itu sedemikian rupa sehingga hanya mampu mencetak calon-calon pegawai yang bakal mengisi eselon-eselon menengah ke bawah dalam piramida sistem administrasi Hindia Belanda. Maka tidak mengherankanlah kiranya jika “produksi” sistem pendidikan kita sekarang pun masih sangat “pegawai-oriented”, hal mana merupakan salah satu sumber problem nasional kita. Keadaan itu menyebabkan semakin terasanya keharusan menemukan sistem

pendidikan baru yang benar-benar bersifat nasional (bukan kolonial) dan mendukung pelaksanaan cita-cita nasional. Sebab diinsafi benar oleh yang bersangkutan bahwa untuk sebagian besar sistem pendidikan kita sekarang ini merupakan kelanjutan sistem yang ada di zaman kolonial.

Dalam keadaan itulah orang mulai teringat dan tertarik kepada pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren mulai ditinjau dan dinilai sebagai sesuatu yang bersifat asli (*indigenous*) Indonesia, dan dihipotesiskan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan alternatif terhadap sistem yang ada. Sudah tentu kesemuanya itu masih berada dalam taraf permulaan, sehingga belum mungkin mengambil keputusan yang mantap pada saat ini.

Salah satu segi yang biasanya dinilai sebagai segi positif dalam sistem pendidikan pesantren ialah terbebasnya para anak didik dan lulusannya dari semangat kepegawaian. Bagi mereka, menjadi pegawai (negeri) adalah sesuatu yang asing, yang seolah-olah merupakan porsi orang-orang lain. Mereka tidak saja merasa tidak berhak atas porsi itu, tetapi yang lebih menonjol lagi ialah perasaan tidak dibenarkan mendapatkannya. Bahkan pada dasarnya mereka bersikap memusuhi (*hostile*) terhadap apa saja yang bersangkutan dengan kepegawaian atau kepriyayan, mengingat asosiasinya dengan politik Belanda dahulu. Kiranya hal ini wajar sekali jika diukur dari salah satu sebab pertumbuhan dan perkembangan pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah. Menurut suatu tinjauan, faktor yang mendorong tumbuhnya pesantren dan madrasah sebegini pesatnyanya sekarang ini, antara lain, adalah justru adanya sekolah-sekolah pemerintah yang dimulai oleh politik etis tersebut tadi. Para ulama yang sikap antinya kepada Belanda merupakan yang sudah *built in* dalam sistem nilai mereka, memandang perlu “menyaingi” sekolah-sekolah Belanda dengan sistem pendidikan lain yang kelak diharapkan mampu memproduksi tokoh-tokoh “kontra elite”. Maka konsekuensinya ialah bahwa mereka anti kepegawaian, sekurang-kurangnya tidak menjadikannya tujuan dalam sistem pendidikan mereka. Dalam keadaan secara ekonomis independen dan mandiri itu

dengan sendirinya mudah timbul dorongan-dorongan dan inisiatif-inisiatif yang melahirkan jiwa kepengusahaan (*enterpreneurship*).

Tetapi ada dua hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pesantren ini. *Pertama*, sistem antipemerintah yang semula ditujukan kepada kolonialis Belanda itu boleh jadi berlarut-larut sampai masa kemerdekaan ini. Sebabnya antara lain ialah bahwa lapisan elite sekarang ini pun sebagian besar masih terdiri dari mereka yang berpendidikan hasil politik etis. Sehingga artikulator resmi masih berada di tangan mereka, hal mana menyebabkan tumbuhnya rasa tersisih serta hilangnya *sense of belonging* pada pihak kalangan pesantren. *Kedua*, orientasi pesantren yang positif (yaitu orientasi bukan kepegawaian) untuk sebagian besar masih bersifat alamiah atau kebetulan. Maka perlu pemantapan dan pengarahan yang lebih sadar serta teratur, dengan sekaligus memberi perbekalan dalam menghadapi lingkungan hidup yang semakin dipermodern ini. [❖]